

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pendidikan Multikultural

Lara Sati¹, Dinie Anggareni Dewi²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Pendidikan No.15, Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung 40625, Jawa Barat, Indonesia
Email: larasati02@upi.edu, dinieanggaraenidewi@upi.edu

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menumbuhkan berbagai prinsip multikulturalisme yang diharapkan dapat diaplikasikan kepada peserta didik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan tujuan dapat berdemokrasi. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab, menghormati dan menanggung keragaman. Kewarganegaraan yang berdasar pada multikulturalisme menjelaskan mengenai paradigma atau sudut pandang keberagaman dengan tetap memegang teguh perbedaan, baik individu (jenis kelamin, tubuh, warna kulit, usia), maupun perbedaan sosial, budaya, bahasa, agama, etnis, serta kelompok. Kewarganegaraan dalam lingkup multikulturalisme memainkan peran yang terpenting dalam mempromosikan keberagaman bangsa Indonesia, oleh karena itu keberagaman bukan menjadi sumber atas konflik, namun untuk toleransi sesama serta saling hormat menghormati dalam membangun fondasi keberagaman etnis Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Multikultural, Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Abstrak

Multicultural-based civic education can be interpreted as a scientific discipline that fosters various principles of multiculturalism which are expected to be applied to students in the school environment, family environment, and in the life of the Indonesian nation with a democratic goal. Responsible citizenship, respecting and regulating diversity. Citizenship which is based on multiculturalism explains the paradigm or point of view of diversity by still adhering to differences, both individuals (gender, body, skin color, age), as well as social, cultural, language, religious, ethnic and group differences. Citizenship plays a role in the sphere of multiculturalism which plays an important role in realizing the diversity of the Indonesian nation, therefore diversity is not a source of conflict, but to respect others and mutual respect in building the foundations of ethnic Indonesians.

Keywords : Citizenship Education, Multicultural Education, The Role of Citizenship Education

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah *nation* atau bangsa dengan kemajemukannya yang terdiri atas berbagai ras, bahasa, suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama. Bangsa Indonesia disebut juga sebagai bangsa atau masyarakat multikultural, hal ini dikarenakan masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agamanya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, yakni memiliki potensi yang harus dibina dan dikembangkan. Tetapi tidak demikian jika keanekaragaman ini tidak difungsikan dan dipupuk dengan baik, akan tumbuh menjadi hal yang berbahaya. Oleh karenanya, pendidikan berdasar multikulturalisme menjadi syarat yang diperlukan guna sebagai pendorong keberagaman tersebut.

Saat ini, keberagaman lebih dianggap sebagai perbedaan yang diperparah dan dimanfaatkan oleh beberapa orang dalam mewujudkan kepentingan pribadi dan ambisi kelompoknya. Hal ini menumbuhkan konflik horizontal dan kemerosotan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik horizontal, kekerasan etnis dan diskriminasi yang terjadi belakangan ini dapat membawa bangsa Indonesia di ambang kehancuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terencana untuk menginternalisasikan pemahaman tentang kedamaian, kemakmuran, cinta, rasa hormat, dan bahkan saling melindungi, inilah peran orang-orang yang baik hati dan berwawasan luas dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

Akibat perbedaan sikap politik terhadap partai demokrasi, konflik horizontal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif biasanya merupakan konflik yang tidak produktif. Tentunya sebagai negara yang beradab perlu kita perhatikan fenomena ini, karena pada umumnya bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan ciri persatuan, kesatuan, dan toleransi yang erat. Idealnya, perbedaan pilihan politik cukup untuk menyelesaikannya secara matang dan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Tentu idealnya, upaya-upaya harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui pendidikan untuk memelihara dan melahirkan semangat toleransi, persatuan, saling menghormati dan cinta. Pendidikan kewarganegaraan menjadi satu bidang penelitian yang melatar belakangi pendidikan nasional. Dalam heterogenitas masyarakat Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa

Seperti yang dikatakan Kerr (1999: 17), pendidikan kewarganegaraan menjadi pusat untuk pembangunan solidaritas dan mempunyai peran tertentu guna membentuk generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan secara luas diartikan sebagai persiapan kaum muda untuk tanggung jawab dan peran mereka sebagai warga negara melalui pembelajaran dan pengajaran di sekolah.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah berperan guna mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang dapat mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup negara kesatuan yang memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan warga mempunyai peran yang terpenting dalam membangun masyarakat yang multikultural.

Seperti apa yang tertulis di Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah nama mata kuliah wajib untuk pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi adalah nama mata kuliah wajib. Oleh karena masyarakat Indonesia yang sangat beragam, maka dalam proses mengintegrasikan pendidikan multikultural Indonesia ke dalam masyarakat Indonesia, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam mendorong keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan artikel yakni untuk menjelaskan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan multikultural

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini merupakan studi literatur yang mana dilakukan dengan cara penelitian dan pemahaman atas beberapa buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan bersangkutan dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan multikultural.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen terkait peran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan multikultural. Arikunto (2010, p.201) mengatakan bahwa dokumen mempunyai asal kata yaitu "dokumen" yang berarti benda tertulis. Sedangkan Sukardi (2004: 34) menjelaskan mengenai jenis dokumen (sumber pustaka), antara lain laporan penelitian, jurnal, jurnal ilmiah, buku terkait, surat kabar, hasil seminar, serta artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan, sumber, statuta, dan lain sebagainya.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

National Council for Social Research (NCSS) mendeskripsikan mengenai kewarganegaraan, yakni rangkaian proses yang berisi semua pengaruh positif dengan tujuannya guna membentuk pandangan warga negara tentang peran masyarakat dalam masyarakat. Hasil Seminar Pendidikan dan Pendidikan Warga Nasional yang diselenggarakan di Tawangmangu juga menunjukkan bahwa sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah menumbuhkembangkan warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar dan standar ukuran, serta regulasi pendidikan kewarganegaraan terbuka. Warga negara. UUD 1945 (Cholisin, 2000: 1.7).

Sunarso et al. (2008: 1) mengemukakan mengenai pendidikan kewarganegaraan yang dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu bidang penelitian yang misinya mencerdaskan bangsa Indonesia dengan slogan "pendidikan berbasis nilai". Konstruksi atas sistem kewarganegaraan didasarkan pada sudut pandang atau paradigma diantaranya: Pertama, kewarganegaraan disusun atas tema pembelajaran kurikulum yang tujuannya guna pengembangan potensi diri dan menjadikannya bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, partisipatif, serta mempunyai tanggung jawab. Kedua, secara teori kewarganegaraan disusun sebagai mata pelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, emosional, serta psikomotorik dimana menyatu dalam pemikiran, konsep, nilai serta moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis dan esensi negara, atau saling menembus dan membaur. pertahanan. Ketiga, warga negara secara praktis dirancang sebagai mata pelajaran yang mengedepankan konten yang menanamkan nilai dan pengalaman belajar, berupa berbagai tingkah laku yang perlu direfleksikan di kesehariannya, dan menjadi jalan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh menggambarkan keberlangsungan sosial dari perspektif pemikiran, konsep, nilai serta moral Pancasila, warga negara demokratis serta pertahanan negara.

Pada kesempatan yang sama, Nu'man Soemantri (Nu'man Soemantri) menjelaskan bahwa PKn merupakan skema pendidikan yang berpusat pada demokrasi politik yang berkembang dengan berkembangnya sumber-sumber ilmu lain, dan berdampak besar bagi masyarakat, pendidikan sekolah serta orang tua. Agar berdampak positif, semua ini telah dilatihkan untuk melatih siswa berpikir kritis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertindak secara demokratis untuk mempersiapkan kehidupan yang demokratis (Cholisin, 2000: 1.7).

Atas beberapa penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa warga negara belajar guna pembentukan warga negara yang mempunyai akhlak mulia, dapat menjalankan hak juga kewajibannya sebagai warga negara, serta dapat mempunyai peran dalam bermasyarakat.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti dijelaskan pusat kurikulum, yang dikutip Sunarso et al. (2008: 11), Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk memberikan kemampuan sebagai berikut:

- a. Pikirkan secara rasional, kritis dan kreatif tentang masalah kewarganegaraan.
- b. Berkualitas tinggi, berperan dengan bertanggung jawab, dan bertindak bijak dalam kegiatan kemasyarakatan, nasional, dan kenegaraan.
- c. Berkembang secara demokratis dan positif, membentuk diri Anda dengan karakter bangsa Indonesia, dan memungkinkan mereka untuk hidup bersama negara lain
- d. Berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung bersama negara lain di dunia melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Cholisin (2000: 1.17) mengutip Ahmad Sanusi yang mengatakan bahwa biasanya tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Hidup kita dijamin oleh konstitusi
- b. Budidaya nasional menurut konstitusi
- c. Tingkatkan kesadaran sipil dengan pendidikan serta pertukaran politik
- d. Pendidikan guna (untuk) warga negara yang mempunyai tanggung jawab.
- e. Latihan demokratis
- f. Berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam urusan public
- g. Sekolah diibaratkan laboratoriumnya demokrasi
- h. Rangkaian proses keputusan
- i. Praktik kepemimpinan
- j. Pengawasan demokratis pada badan legislatif dan juga eksekutif.
- k. Mempromosikan pemahaman dan kerjasama internasional

Pengertian Pendidikan Multikultural

Ainnurofiq Dawam (2003: 100-101) juga mendeskripsikan mengenai pendidikan multikultural yang secara etimologis berasal dari dua kata yakni pendidikan dan juga multikulturalisme. Pendidikan merupakan sebuah proses menumbuhkan perilaku, bertujuan untuk pendewasaan umat manusia dengan cara pelatihan, pengajaran, dan pendidikan. Multikulturalisme terdiri atas kata "multi", "multi" artinya keberagaman, dan "culture" artinya budaya. Pendidikan multikultural menjadi proses pengembangan potensi manusia untuk mengapresiasi keberagaman dan perbedaan atau heterogenitas.

Pendidikan multikultural juga didefinisikan oleh Sulalah (2012: 48) yakni konsep pemikiran dalam pemberian kesempatan pendidikan yang adil untuk semua peserta didik yang memiliki perbedaan etnik, ras, kelas sosial, kelompok budaya, dan agama. Seperti Banks & Banks (2005: 3) yang menjelaskan bahwa:

"Multicultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process. Multicultural education incorporates the idea that all students regardless of their gender and social class and their ethnic, racial, or cultural characteristics should have an equal opportunity to learn in school."

Dilihat dari sudut pandang industri perbankan dan industri perbankan, pendidikan multikultural terdiri atas tiga aspek, yakni konsep atau gagasan, serta kecenderungan serta proses reformasi pendidikan. Tidak dapat di beda-bedakan baik itu dari gender juga kelas sosial, ras, etnis maupun karakteristik budaya, seluruh peserta didik mendapatkan waktu yang sama untuk dapat menuntut ilmu di sekolah. Pendidikan multikultural merupakan jawaban yang tepat atas permasalahan etnis Indonesia yang dikarenakan oleh keberagaman. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 191) juga memberi penjelasan mengenai pendidikan multikultural yang merupakan pendidikan dengan penanaman rasa hormat menghormati, keikhlasan serta toleransi atas keragaman sosial dan budaya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pendidikan multikultural oleh beberapa tokoh, disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan dengan penanaman toleransi, penghormatan dan penghormatan terhadap keragaman suku, ras, agama, budaya dan bahasa dan dengan menerima kehidupan bersama atas keberagaman tanpa adanya masalah.

Tujuan Pendidikan Multikultural

Zamroni (2011: 140) mengemukakan mengenai tujuan dari adanya pendidikan multikultural yakni pemberian peluang yang adil kepada siswa agar dapat meningkatkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. Pendidikan multikultural memiliki tujuan yang dijelaskan Ainul Yaqin (2005: 26) ada dua tujuan yakni tujuan diawal dan tujuan diakhir. Tujuan awal pendidikan multikultural merupakan membentuk rancangan pendidikan multikultural di kalangan dosen, guru, pakar pendidikan, pembuat kebijakan dan mahasiswa di bidang pendidikan sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai kebhinekaan, demokrasi dan humanisme di dunia. Tujuan akhirnya merupakan memungkinkan siswa mencapai demokrasi, pluralisme dan humanisme.

Agus Salim (2006: 72) berkeyakinan bahwa pendidikan multikultural tujuannya dapat merubah lingkungan pendidikan agar bisa meningkatkan rasa hormat menghormati pada semua kelompok budaya, dan memperoleh peluang atas perlindungan hukum dan akses pendidikan yang sama.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang tujuan dari adanya pendidikan multikultural, maka kesimpulannya adalah pendidikan multikultural bertujuan agar dapat memberikan peluang yang setara kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya.

Padahal, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural ialah segmen dari ilmu sosial, dan fokusnya adalah pada penyelesaian berbagai masalah. Terutama dalam hal keberagaman, hak asasi manusia, konflik etnis, demokrasi dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, ilmu sosial menjadi salah satu kepentingan utama manusia, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Supriatna (2020: 130) mengemukakan yakni "tujuan ilmu sosial adalah menjawab semua fenomena dan memecahkan bermacam-macam masalah sosial yang terjadi". Torak (2018: 25) mengacu pada hasil penelitian sebelumnya dan mengemukakan dalam konteks optimalisasi pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan multikultural: "Pendidikan kewarganegaraan memasukkan materi budaya dalam satu aspek substansi keilmuannya, dan orientasinya adalah siswa secara sukarela menerima Kebangsaan Indonesia Realitasnya adalah multikulturalisme, upaya dan tanggung jawab untuk mengawasi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Idealnya, penelitian sebelumnya ini akan memperkuat eksistensi PKn merupakan ragam jenis pendidikan serta pembelajaran budaya. Melalui rasionalisasi, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta merupakan mata kuliah wajib bagi siswa. Sebagai pendidikan multidisiplin, pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada aspek material dan substantif untuk melindungi integritas negara kesatuan republik indonesia dan pentingnya asosiasi dan integrasi. Pastinya, pekerjaan ini merupakan gerakan fundamental, tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan kewarganegaraan dan menjadikannya kajian nasional yang komprehensif berdasarkan "ketuhanan".

PEMBAHASAN

Sebagai filosofi pembelajaran yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual serta emosional siswa, pendidikan kewarganegaraan mempunyai berbagai macam pembelajaran dan dapat sebagai jawaban atas keinginan dan permasalahan zaman. Pada lingkup pendidikan kewarganegaraan yang bersifat material, tentunya secara umum akan fokus pada pembahasan pemikiran Pancasila, bela negara, kemasyarakatan dan politik, nilai dan moral, multikulturalisme, hukum dan demokrasi, ketatanegaraan dan ketatanegaraan, dan hubungan Internasional, Hak Asasi Manusia, budaya dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan negara, dan muatan substantif lain terkait dengan tujuan dan penelitian pendidikan kewarganegaraan.

Dengan menjelaskan bahwa, "ruang lingkup atau substansi materi pendidikan kewarganegaraan terfokus pada Pancasila, UUD 1945, demokrasi, nilai-nilai, moral, etika, politik, hukum, budaya, kearifan lokal dan keragaman etnis" diperoleh penguatan. Tentunya selain menjadi penelitian yang penting, esensi materi tentang kebudayaan nasional Indonesia juga menjadi modal akademik yang dapat mengubah pandangan mahasiswa terhadap fenomena budaya bangsa atau keragaman etnis.

Dalam filosofis, multikulturalisme negara Indonesia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu realitas ini harus disikapi dengan bijak lalu dimaksimalkan sebagai cara memelihara jiwa bangsa dan menggiring bangsa Indonesia ke puncak peradabannya. Umumnya, cara menyalurkan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa tentang perlunya menjaga multikulturalisme pada negara.

Tentunya harus untuk memenuhi tiga aspek penting dalam pembelajaran yang terfokus pada rangka afektif, kognitif dan psikomotorik melalui orientasi untuk menyalurkan pemahaman yang benar, agar mahasiswa mau dan bertanggung jawab berperan dalam menerima dan mengambil bagian dalam menjaga realitas bangsa Indonesia atas bangsa multikultural. Tidak dimaksudkan dalam pemberian ajaran atau doktrin yang melenyapkan perilaku kritis dan pikiran asli siswa. Namun pemberian pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual tentang realitas kebhinekaan bangsa, sehingga siswa mampu diakomodir oleh perasaan ingin tahunya, dan bertindak sesuai pemahamannya.

Padahal, pendidikan multikultural merupakan penelitian yang bertujuan merasionalisasi penerimaan perbedaan sosial, khususnya perbedaan sosial ras, agama, budaya, dan gender, dalam mencapai perdamaian serta keadilan, dan juga mengurangi diskriminasi yang berdampak negatif bagi sebagian besar masyarakat.

Selaku pendidikan berbasis multikultural, PKn harus dapat meningkatkan keyakinan dan persepsi pelajar pada kejadian multikultural tanpa paksaan, namun tetap harus diinternalisasikan berdasarkan dengan dasar negara dan Undang Undang Dasar 1945, karena nilai-nilai tersebut pada dasarnya dapat menerima dan menjaga keberagaman, tentunya dalam konteks karakter dan sikap.

Tidak dapat disangkal bahwa pembelajaran kewarganegaraan, sebagai pendidikan multikultural, dapat mempengaruhi keberhasilan gerakan mental siswa, dan sebagian besar bergantung pada arah, rencana, jenis, dan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan

kognisi budaya dan kemampuan emosional siswa. Inti dari gerakan spiritualnya pada ilmu sosial lebih menitikberatkan pada pengetahuan profesional, kreativitas, perubahan, dan kreasi. Noviansah mengungkapkan bahwa "gerakan psikis menghubungkan individu dengan saraf dan otot".

Peran pendidikan kewarganegaraan bagi pendidikan multikultural dalam pembentukan akhlak siswa.

Sebagai negara yang religius, Indonesia tentunya memiliki etika, nilai dan akhlak yang diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Pejabat negara yang bekerja dalam organisasi pemerintahan, ini adalah hal yang baik untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan dan tujuan tertentu untuk memastikan keadilan, kemakmuran, dan perdamaian umum. Pada kenyataannya, masyarakat yang beretika pasti akan memfokuskan pada kepentingan publik, seperti solidaritas sosial, integrasi sosial yang tidak akan menumbuhkan konflik, tindakan diskriminatif dan tindakan negatif lainnya. Indonesia harus melihat bahwa sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, isu-isu sensitif seperti ras, agama, suku, lintas budaya, dan gender dapat dengan mudah menarik perhatian Indonesia.

Dalam rangka pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan harus dijalankan seoptimal dan semaksimal mungkin, terutama dalam pembentukan moral siswa. Melalui rasionalisasi, kerangka ilmu pendidikan kewarganegaraan memberikan dukungan yang terkuat untuk mencapai pencapaian tersebut, sebab pendidikan kewarganegaraan mempunyai pusat penelitian yang universal yaitu pemikiran, moral dan nilai. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seringkali diidentifikasi dengan pendidikan karakter atau pendidikan moral dan nilai, sebab pada hakikatnya adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang terang akal, serta memungkinkan mereka paham mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, dan bisa berguna bagi bangsa.

Dengan nilai dan kemampuan pendidikan akhlaknya, PKn memiliki kemampuan yang sanggup untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada siswa siswi dan menciptakan kualitas moral siswa siswi yang berjiwa kepemimpinan. Etika yang ditempuh melewati PKn dan pembelajaran sebagai pendidikan multikultural merupakan menjadikan peserta didik yang memfokuskan pada integrasi etnis, kemudian melindungi ketentraman dalam masyarakat, dan juga mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang hidup di lingkungan sekitar.

Faktanya tidak mudah untuk mendidik siswa yang beretika, karena ini merupakan proses investasi yang berbudaya di Indonesia, oleh karena itu setiap tenaga pendidik khususnya yang mengajar pendidikan kewarganegaraann harus memiliki peran nyata untuk membentuk siswa Pancasila. Tentunya siswa Pancasila merupakan anak didik yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang spiritual, intelektual dan emosional. Dengan latar belakang menerima dan memelihara warisan budaya bangsa, tentunya setiap guru perlu secara sukarela memahami kenyataan tersebut. Terjemahkan pemahaman ini kepada siswa. Ini bukan pembelajaran satu arah, hal ini dapat menghalangi hak siswa untuk dapat berdikusi.

Tugas guru yang jelas dalam pendidikan multikultural adalah: 1) membentuk pola multikultural, 2) membentuk sikap untuk saling menghargai budaya, 3) membentuk sikap kepedulian di lingkungan sosial, 4) membentuk sikap perlawanan diskriminatif pada ras, dan 5) membentuk sikap Kemampuan Sikap Anti Diskriminasi (Kusnadi dan Assa'diyah, 2020: 6-8).

Motivasi pengembangan keilmuan PKn yang harus disesuaikan dengan berkembangnya dan kebutuhan zaman ternyata belum benar-benar merubah kebutuhan dasar dan hakikat santri Pancasila yang dibentuk oleh cita-cita keilmuannya. Tentunya selaku pendidikan moral dan nilai, PKn harus menyalurkan pemahaman yang menyeluruh dan memperdebatkan informasi tentang pentingnya menerima dan merawat budaya negara. Sebagai kajian internalisasi nilai-nilai sakral dan humanistik bagisiwa siswi, PKn mempunyai peran yang penting dalam melindungi asosiasi dan integrasi bangsa Indonesia lalu menjadikan negara sebagai puncak peradabannya. Menerima dan peduli dengan multikulturalisme negara, bahkan berkontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dan menjaga integrasi bangsa, telah membuktikan penerapan konsep moral kewarganegaraan, bahkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Pendidikan PKn merupakan pendidikan yang berbasis multikultural dimana pendidikan ini memuat ilmu yang menumbuhkan beberapa prinsip multikulturalisme. Beberapa prinsip tersebut diharapkan dapat diaplikasikan pada kehidupan berbangsa Indonesia khususnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dengan tujuan dapat melindungi demokrasi. Masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menghargai keberagaman serta hidup dalam keberagaman. Masyarakat yang bedasar multikulturalisme menumbuhkan paradigma atau sudut pandang akan keberagaman dengan terus penghargaan bagi perbedaan, baik itu perbedaan individu (jenis kelamin, warna kulit, usia dan tinggi), serta perbedaan agama, sosial budaya, bahasa, dan kelompok etnis. Warga negara yang berdasar pada multikulturalisme mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan keberagaman bangsa Indonesia, yang mana keberagaman tidak dapat menyebabkan sumber konflik, namun dalam rangka toleransi serta hormat menghormati guna memperkuat keberagaman bangsa negara Indonesia serta makna Bhinneka Tunggal Ika .

SARAN

Dalam proses pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan yang berdasar pada multikulturalisme harus mencerminkan multikulturalisme untuk merefleksikan masyarakat multikultural. Hal itu dikarenakan didalam rangkaian pembelajaran siswa harus lebih dekat bersama masyarakat, kehidupannya serta permasalahan sosialnya. Mahasiswa harus mengenal dan telah mendapatkan pelatihan untuk menghadapi dan memecahkan masalah keberagaman di masyarakat. Warganegara guru harus melakukan reformasi diri dan refleksi diri untuk mempersiapkan diri membela dan mengajar atas dasar multikulturalisme. Guru harus mendapatkan bimbingan dan bimbingan agar dapat memainkan peran terbaiknya agar pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dengan baik melalui organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan multikultural di bidang kewarganegaraan dan disiplin ilmu lainnya harus ditingkatkan, terutama di wilayah konflik yang tadinya berkonflik dan wilayah yang banyak keanekaragamannya, agar konflik tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles. (2017). *Pendidikan Multikultural untuk Memperkuat Kohesifitas Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jurnal Educative: Journal of Educational Studies. 2 (1). Hlm. 30-46.
- Arif, Dikdik Baehaqi. (2017). *Pengembangan Kebajikan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Journal Civics & Social Studies Vol.1 No. 1. Juni 2017
- Nanggala, Agil. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural*. Jurnal Soshum Insentif ISSN 2655 268X | 2655-2698. Volume 3, No. 2, Tahun 2020
- Dwintari, J. W. (2018). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia*. Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya. 2 (1). Hlm. 69 81.
- Lestari, G. (2015). *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 28 (1). Hlm. 31-37.
- Kamal, Muhiddinur. *Pendidikan Multi Kultural Bagi Masyarakat yang Majemuk*. Dosen STAIN Bukittinggi, Sumatera Barat. Jurnal Al-Ta'lim, Jilid 1, Nomor 6 November 2013, hlm.451 458
- Hilmy, Masdar, 2003. *Menggagas Pendidikan Berbasis Multikulturalisme*. Ulumuna, VII, 12 9 Juli Desember
- Mahfud, Choirul, 2004. *Menggagas Pendidikan Multikultural*. Surabaya: Radar Surabaya 4 November
- Atmadja, N. B. (2003). *Multikulturalismne dalam perspektif filsafat Hindu*. Makalah disajikan dalam Seminar Damai dalam Perbedaan. Singaraja: 5 Maret 2013
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Bandung: UPI.
- Chandra. (2012) Penerapan model debat dalam pembelajaran budaya demokrasi untuk meningkatkan mengemukakan pendapat siswa (penelitian tindakan kelas pada pembelajaran PKn di kelas XI IPA 1 SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung). Bandung: UPI.
- Hanum, F. & Raharja, S. (2011). *Pengembangan model pendidikan multikultural*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 04 (2).
- Suparlan, P. (2002). *Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Multikultural: tantangan tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.